



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 19 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU
LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA
DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KARIMUN JAWA**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, Menteri Perhubungan wajib menetapkan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang mengesahkan *Convention on The International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 53);
7. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan "*International Convention for The Safety of Life at Sea, 1974*", sebagai hasil Konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "*International Convention for The Safety of Life at Sea 1960*", sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini;

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 173/AL.401/PHB-84 tentang berlakunya *The IALA Maritime Bouyage System for Region-A* dalam Tatanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di Indonesia;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi-Pelayaran;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1573);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/12/DJPL-18 Tanggal 19 Desember 2018 perihal Penyampaian Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Alur-Pelayaran Taman Nasional Togean, Alur-Pelayaran Taman Nasional Legon Bajak, Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa dan Alur-Pelayaran Taman Nasional Kepulauan Seribu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KARIMUN JAWA.
- PERTAMA : Menetapkan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dibatasi oleh titik koordinat geografis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menetapkan Sistem Rute di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Menetapkan Tata Cara Berlalu Lintas di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Berlalu Lintas di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diatur dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karimun Jawa.
- KELIMA : Menetapkan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEENAM : Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dan zonasi Taman Nasional Karimun Jawa wajib dimuat dalam Peta Laut Indonesia Edisi Terbaru Nomor 221, Nomor 222 dan Buku Petunjuk Pelayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karimun Jawa dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- KEDELAPAN : Pengawasan terhadap penataan dan penyelenggaraan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa dilaksanakan oleh Distrik Navigasi Kelas II Semarang dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- KESEMBILAN : Pemeliharaan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa dan Alur-Pelayaran Perlintasan Pada Alur Penyeberangan Karimun Jawa dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karimun Jawa secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KESEPULUH : Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dan Diktum KEDELAPAN digunakan sebagai bahan evaluasi Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk setiap perubahan terhadap Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa.

- KESEBELAS : Perubahan terhadap Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, diinformasikan melalui penerbitan Maklumat Pelayaran (MAPEL) serta disiarkan melalui Berita Pelaut Indonesia (*Notice to Marines*).
- KEDUABELAS : Setiap perubahan Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun akan dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri ini.
- KETIGABELAS : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPATBELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
10. Gubernur Jawa Tengah;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
12. Bupati Jepara;
13. Kepala Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut;
14. Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas II Semarang;
15. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas;
16. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karimun Jawa.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

Lampiran I
Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Penetapan Alur-Pelayaran,
Sistem Rute, Tata Cara Berlalu
Lintas dan Daerah Labuh Kapal
Sesuai Dengan Kepentinganya di
Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
Karimun Jawa
Nomor : KM 19 TAHUN 2019
Tanggal : 25 Januari 2019

ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KARIMUN JAWA

1. Titik Koordinat *Center Line* Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa

NO	TITIK KOORDINAT ALUR	
	LINTANG	BUJUR
A	5° 54' 6.0380" S	110° 26' 32.8650" E
B	5° 53' 16.4525" S	110° 26' 19.1955" E
C	5° 53' 3.9444" S	110° 26' 21.8798" E
D	5° 53' 10.5096" S	110° 25' 59.6471" E
E	5° 52' 53.6548" S	110° 25' 44.8945" E
F	5° 52' 45.2385" S	110° 25' 48.6717" E
G	5° 52' 48.6438" S	110° 25' 42.3981" E
H	5° 52' 43.3700" S	110° 25' 45.0500" E

2. Titik Koordinat Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa

NO	TITIK KOORDINAT CENTER LINE	
	LINTANG	BUJUR
1	5° 54' 5.6915" S	110° 26' 34.1185" E
2	5° 53' 16.4764" S	110° 26' 20.5511" E
3	5° 53' 4.2180" S	110° 26' 23.1511" E
4	5° 53' 14.7954" S	110° 26' 18.2210" E
5	5° 53' 9.3717" S	110° 26' 0.3802" E
6	5° 52' 53.4256" S	110° 25' 46.4230" E
7	5° 52' 54.3684" S	110° 25' 43.8068" E
8	5° 53' 11.6176" S	110° 25' 58.9672" E
9	5° 53' 17.4902" S	110° 26' 18.1325" E
10	5° 54' 6.3527" S	110° 26' 31.6027" E
11	5° 53' 3.6708" S	110° 26' 20.6084" E

3. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran Eksisting

NO	NAMA DAN JENIS SBNP	NO DSI	POSISI
1	Ramsu Merah	3293,5	5° 52' 46.4900" S / 110° 25' 46.4600" E
2	Ramsu Hijau	3293,4	5° 52' 47.4800" S / 110° 25' 49.2800" E
3	Ramsu Merah	3293,2	5° 53' 23.0000" S / 110° 26' 11.0000" E
4	Ramsu Hijau	3293,1	5° 53' 27.0000" S / 110° 26' 38.0000" E

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

Lampiran II
Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Penetapan Alur-Pelayaran,
Sistem Rute, Tata Cara Berlalu
Lintas dan Daerah Labuh Kapal
Sesuai Dengan Kepentingannya di
Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
Karimun Jawa

Nomor : KM 19 TAHUN 2019

Tanggal : 25 Januari 2019

SISTEM RUTE ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KARIMUN JAWA

Sistem Rute Alur-Pelayaran yang ditetapkan di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa yaitu Rute Satu Arah (*one ways route*). Kondisi Kedalaman, Lebar, Panjang Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yaitu :

1. Kedalaman Existing 10 - 26 Mlws;
2. Lebar Alur-Pelayaran 80 Meter;
3. Panjang Alur-Pelayaran dari Buoy MPMT sampai pintu masuk Pelabuhan Karimun Jawa adalah 2,14 *Nautical Miles* (NM) atau 3,693 Kilometer (KM). Berdasarkan hal tersebut, ukuran dan sarat (draft) kapal yang dapat melalui Alur-Pelayaran ini maksimum 9 (sembilan) meter pada kondisi air surut terendah.
4. Jumlah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran Eksisting di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa sebanyak 4 (empat) Unit.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

Lampiran III

Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Penetapan Alur-Pelayaran,
Sistem Rute, Tata Cara Berlalu
Lintas dan Daerah Labuh Kapal
Sesuai Dengan Kepentingannya di
Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
Karimun Jawa

Nomor : KM 19 TAHUN 2019

Tanggal : 25 Januari 2019

TATA CARA BERLALU LINTAS ALUR-PELAYARAN MASUK
PELABUHAN KARIMUN JAWA

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menekan angka kecelakaan kapal maka perlu diatur tata cara berlalu lintas di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa sebagai berikut:

1. Pemanduan

- a. kapal dengan ukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih yang berlayar di perairan wajib pandu wajib menggunakan pelayanan jasa pemanduan kapal;
- b. mesin penggerak utama dan alat navigasi harus dalam kondisi baik dan normal untuk olah gerak kapal;
 - 1) mengibarkan bendera "G" pada siang hari dan menyalakan lampu putih merah pada malam hari apabila kapal sedang menunggu petugas pandu;
 - 2) mengibarkan bendera "H" pada siang hari dan menyalakan lampu putih merah pada malam hari apabila petugas pandu berada di atas kapal; dan
 - 3) mengibarkan bendera "Q" pada siang hari dan menyalakan lampu putih merah pada malam hari bagi kapal yang baru tiba dari luar negeri, petugas pandu hanya diperbolehkan naik ke kapal untuk membawa kapal apabila kapal telah dinyatakan bebas dari penyakit menular oleh petugas karantina kesehatan (*free pratique*) dan bendera kuning telah diturunkan.

2. Komunikasi

- a. pemilik/operator kapal atau Nakhoda wajib memberitahukan rencana kedatangan kapalnya kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karimun Jawa dengan mengirimkan telegram radio Nakhoda (*master cable*) melalui Stasiun Radio Pantai (SROP) Karimun Jawa dengan tembusan kepada perusahaan angkutan laut atau agen umum dalam waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan; dan
- b. setiap kapal yang memasuki dan keluar Alur-Pelayaran wajib melapor kepada Stasiun Radio Pantai (SROP) Karimun Jawa melalui frekuensi kerja *channel 20*.

3. Proses Kapal Masuk

a. Dalam Kondisi Normal:

- 1) setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil untuk menghindari tubrukan dan dapat diberhentikan dalam suatu jarak yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada;
- 2) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, apabila keadaan mengijinkan harus tegas dan jelas dilakukan dalam waktu yang cukup dan benar-benar memperhatikan persyaratan kepelautan yang baik; dan
- 3) apabila kondisi dermaga sedang penuh atau Nakhoda memutuskan untuk berlabuh terlebih dahulu, maka kapal dapat berlabuh di areal labuh yang sudah disediakan.

b. Dalam Kondisi Angin di Atas Normal/Kabut/Huja Deras/Gelombang Tinggi:

- 1) untuk memasuki alur-pelayaran, maka kapal menggunakan sarana navigasi visual, elektronik (radar/GPS/AIS) dan peralatan navigasi lainnya secara baik dan tepat guna; dan
- 2) kecepatan kapal disekitar pelampung suar pengenalan (MPMT) disarankan menggunakan *maneuvering speed*.

4. Proses Kapal Keluar

- a. Nakhoda dan/atau petugas pandu melaporkan kepada VTS Tanjung Emas mengenai ukuran kapal dan jam kapal mulai dipandu keluar;
- b. meminta informasi ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karimun Jawa, mengenai pergerakan kapal yang keluar/masuk Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Karimun Jawa;
- c. arahkan haluan menuju bagian tengah alur-pelayaran dan berlayar menuju Pelampung Suar pengenalan dengan haluan; dan
- d. sesampainya di titik Naik Turun Petugas Pandu (*Pilot Boarding Ground*), maka Petugas Pandu turun dan dijemput oleh kapal pandu.

5. Tindakan Menghindari Tubrukan

- a. Pengaturan Tindakan Untuk Menghindari Tubrukan Meliputi:
 - 1) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, apabila keadaan mengijinkan harus tegas dan jelas dilakukan dalam waktu yang cukup dan benar-benar memperhatikan persyaratan kepelautan yang baik;
 - 2) setiap perubahan haluan dan/atau kecepatan untuk menghindari tubrukan, apabila keadaan mengijinkan harus cukup besar sehingga menjadi jelas bagi kapal lain yang sedang mengamati dengan penglihatan atau dengan radar, serangkaian perubahan kecil dari haluan dan/atau kecepatan hendaknya dihindari;
 - 3) apabila ada ruang gerak yang cukup, maka perubahan haluan merupakan tindakan yang paling berhasil untuk menghindari situasi saling mendekati terlalu rapat, dengan ketentuan bahwa perubahan itu dilakukan dalam waktu yang cukup dini, dan tidak mengakibatkan terjadinya situasi saling mendekati terlalu rapat;
 - 4) tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan dengan kapal lain harus sedemikian rupa sehingga menghasilkan pelewatan dengan jarak yang aman dan, hasil tindakan tersebut harus dikaji dengan seksama sampai kapal tersebut dilewati dan bebas sama sekali; dan
 - 5) apabila diperlukan untuk menghindari tubrukan atau memberikan waktu yang lebih banyak untuk menilai keadaan, maka kapal harus mengurangi kecepatannya atau menghilangkan kecepatannya sama sekali dengan memberhentikan atau menjalankan mundur sarana penggerakannya.

b. Pengaturan Tata Cara Berlalu Lintas Kapal Yang Menggunakan Layar Meliputi:

- 1) Apabila 2 (dua) kapal sedang saling mendekat sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, maka salah satu dari kedua kapal itu harus menghindari kapal lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) apabila masing-masing mendapatkan angin di lambung yang berlainan, maka kapal yang mendapat angin di lambung kiri harus menghindari kapal yang lain;
 - b) apabila mendapat angin di lambung yang kanan, maka kapal yang ada di atas angin harus menghindari kapal yang ada di bawah angin; dan
 - c) apabila kapal mendapat angin di lambung kiri melihat sebuah kapal di atas angin dan tidak dapat menentukan dengan pasti apakah kapal lain itu mendapat angin lambung kiri atau kanan, maka kapal itu harus menghindari kapal lain itu.
- 2) Untuk memenuhi aturan ini, sisi atas angin harus dianggap sisi yang berlawanan dengan sisi tempat layar utama berada, atau bagi kapal dengan layar segi empat adalah sisi yang berlawanan dengan sisi tempat layar membujur itu berada.

c. Pengaturan Penyusulan meliputi:

- 1) setiap kapal yang sedang menyusul kapal lain harus menghindari kapal lain yang sedang disusul tersebut;
- 2) kapal harus dianggap menyusul apabila sedang mendekati kapal lain dari arah yang lebih besar dari 22,5 (dua puluh dua koma lima) derajat dibelakang arah melintang, yaitu dalam kedudukan sedemikian sehingga terhadap kapal yang sedang disusul itu pada malam hari kapal hanya dapat melihat penerangan buritan, tetapi tidak satupun dari penerangan lambungnya;
- 3) apabila kapal dalam keadaan ragu-ragu apakah ia sedang menyusul kapal lain atau tidak, maka kapal itu harus beranggapan bahwa sedang menyusul kapal lain; dan
- 4) setiap perubahan baringan antara kedua kapal yang terjadi kemudian tidak akan mengakibatkan kapal yang sedang memotong dalam pengertian ketentuan ini atau membebaskannya dari kewajiban untuk menghindari kapal yang sedang disusul itu sampai kapal tersebut dilewati dan bebas sama sekali.

- d. Pengaturan Tata Cara Berlalu Lintas Kapal Dalam Situasi Berhadapan Meliputi:
- 1) Apabila 2 (dua) kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan berlawanan atau hampir berlawanan sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, maka masing-masing kapal harus, mengubah haluannya ke kanan sehingga masing-masing kapal akan berpapasan di lambung kirinya;
 - 2) Keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus dianggap ada apabila kapal melihat kapal lain tepat atau hampir di depan dan pada malam hari kapal itu dapat melihat penerangan-penerangan tiang kapal lain tersebut terletak segaris atau hampir segaris dan/atau kedua penerangan lambung serta pada siang hari kapal itu mengamati gatra (aspek) yang sesuai mengenai kapal lain tersebut; dan
 - 3) apabila kapal dalam keadaan ragu-ragu atas terdapatnya keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) maka, kapal itu harus beranggapan bahwa keadaan tersebut ada dan bertindak sesuai angka 1) dan angka 2).
- e. Dalam pengaturan tata cara berlalu lintas kapal dalam situasi memotong, apabila 2 (dua) kapal tenaga sedang berlayar dengan haluan saling memotong sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, maka kapal yang mendekati kapal lain di sisi kanannya harus menghindar, dan apabila keadaan mengijinkan harus menghindarkan dirinya memotong didepan kapal lain itu.
- f. Dalam pengaturan tata cara tindakan kapal menghindari, maka setiap kapal yang diwajibkan menghindari kapal lain secepat mungkin. Dalam pengaturan tanggung jawab antar kapal meliputi:
- 1) Kapal bermesin yang sedang berlayar harus menghindari:
 - a) kapal yang tidak terkendalikan;
 - b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas;
 - c) kapal yang sedang menangkap ikan; dan
 - d) kapal layar.

- 2) Kapal layar yang sedang berlayar harus menghindari:
 - a) kapal yang tidak terkendalikan;
 - b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas; dan
 - c) kapal yang sedang menangkap ikan.
- 3) Kapal yang sedang menangkap ikan sedapat mungkin harus menghindari:
 - a) Kapal yang tidak terkendalikan; dan
 - b) Kapal yang olah geraknya terbatas.
- 4) Setiap kapal, kecuali kapal yang tidak dapat dikendalikan atau kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, apabila keadaan mengijinkan harus menghindarkan dirinya merintangi jalan aman sebuah kapal yang terkendala oleh saratnya; dan
- 5) Kapal yang terkendala oleh saratnya harus berlayar dengan kewaspadaan khusus dengan benar-benar memperhatikan keadaannya yang khusus tersebut.

6. Larangan

- a. kapal cargo/container dilarang memasuki alur-pelayaran dengan *under keel clearance* (UKC) kurang dari 10% (sepuluh persen) dari draft, kecuali atas izin Syahbandar dan kapal tongkang dengan *under keel clearance* (UKC) kurang dari 5% (lima persen) dari sarat draft;
- b. kapal penangkap ikan dilarang menangkap ikan di alur-pelayaran;
- c. kapal dilarang masuk perairan wajib pandu tanpa mendapat pemanduan dari petugas pandu;
- d. petugas pandu dilarang meninggalkan kapal yang dipandu dalam kondisi situasi :
 - 1) kapal kandas;
 - 2) kapal tubrukan;
 - 3) kerusakan mesin/kemudi; dan/atau;
 - 4) keadaan lain yang mengganggu lalu lintas kapal.
- e. larangan kapal untuk menyusul kapal lain pada ukuran LOA tertentu sesuai dengan ketentuan sistem rute;

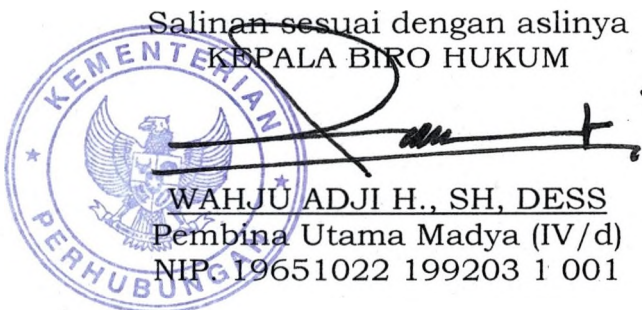
- f. kapal yang sandar/tender dengan kapal lain yang sedang sandar di dermaga umum/khusus hanya diijinkan 1 (satu) kapal saja yang sandar/tender di kapal yang sedang sandar di dermaga atas pertimbangan keselamatan kapal yang akan berolah gerak keluar/masuk; dan
- g. membuang sampah, limbah dan bahan lain dari pengoperasian kapal.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

Lampiran IV
Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Penetapan Alur-Pelayaran,
Sistem Rute, Tata Cara Berlalu
Lintas dan Daerah Labuh Kapal
Sesuai Dengan Kepentingan di
Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
Karimun Jawa
Nomor : KM 19 TAHUN 2019
Tanggal : 25 Januari 2019

DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA
DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KARIMUN JAWA

1. DAERAH LABUH JANGKAR I KAPAL PENYEBERANGAN KARIMUN JAWA

Titik	Koordinat	Luasan	Kedalaman
1	5° 53' 32.4593" S/ 110° 26' 40.1037" E		36 METER
2	5° 53' 32.4915" S/ 110° 27' 12.6251" E		
3	5° 53' 48.7742" S/ 110° 27' 12.6092" E		
4	5° 53' 48.7420" S/ 110° 26' 40.0875" E		

2. DAERAH LABUH JANGKAR II KAPAL PENYEBERANGAN KARIMUN JAWA

Titik	Koordinat	Luasan	Kedalaman
1	5° 52' 8.5900" S/ 110° 23' 20.8800" E		32-41 METER
2	5° 52' 8.6256" S/ 110° 23' 12.7502" E		
3	5° 52' 24.9025" S/ 110° 23' 53.732" E		
4	5° 52' 24.8669" S/ 110° 23' 20.862" E		

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

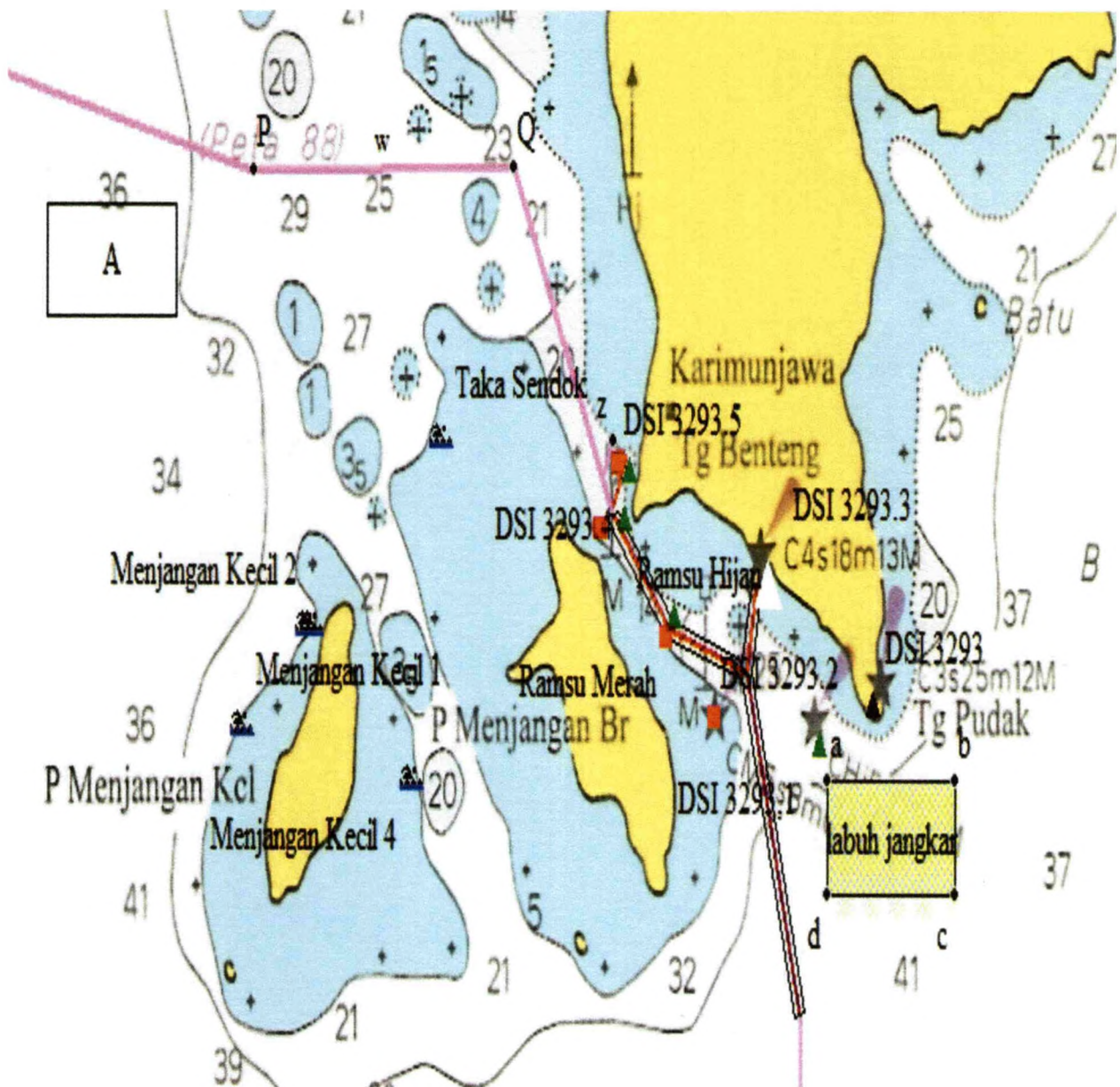
Lampiran V

Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Penetapan Alur-Pelayaran,
Sistem Rute, Tata Cara Berlalu
Lintas dan Daerah Labuh Kapal
Sesuai Dengan Kepentingannya di
Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
Karimun Jawa

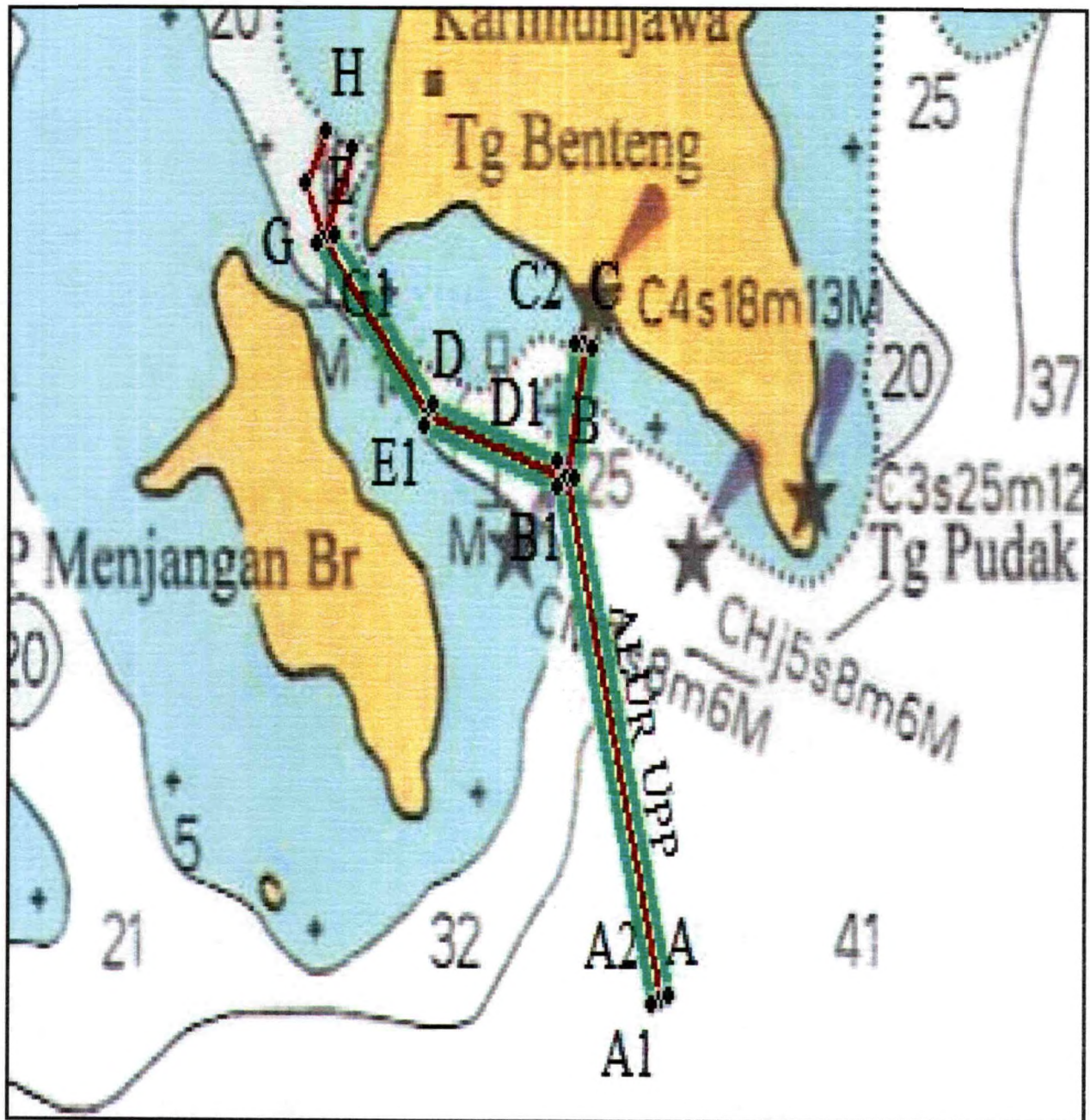
Nomor : KM 19 TAHUN 2019

Tanggal : 25 Januari 2019

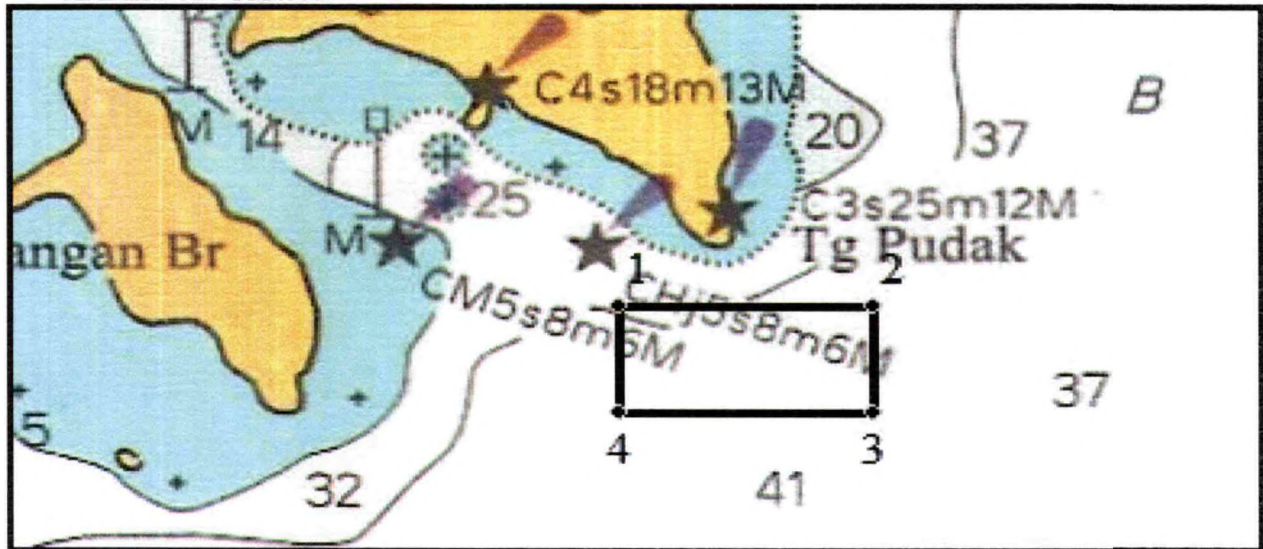
1. PETA ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KARIMUN JAWA



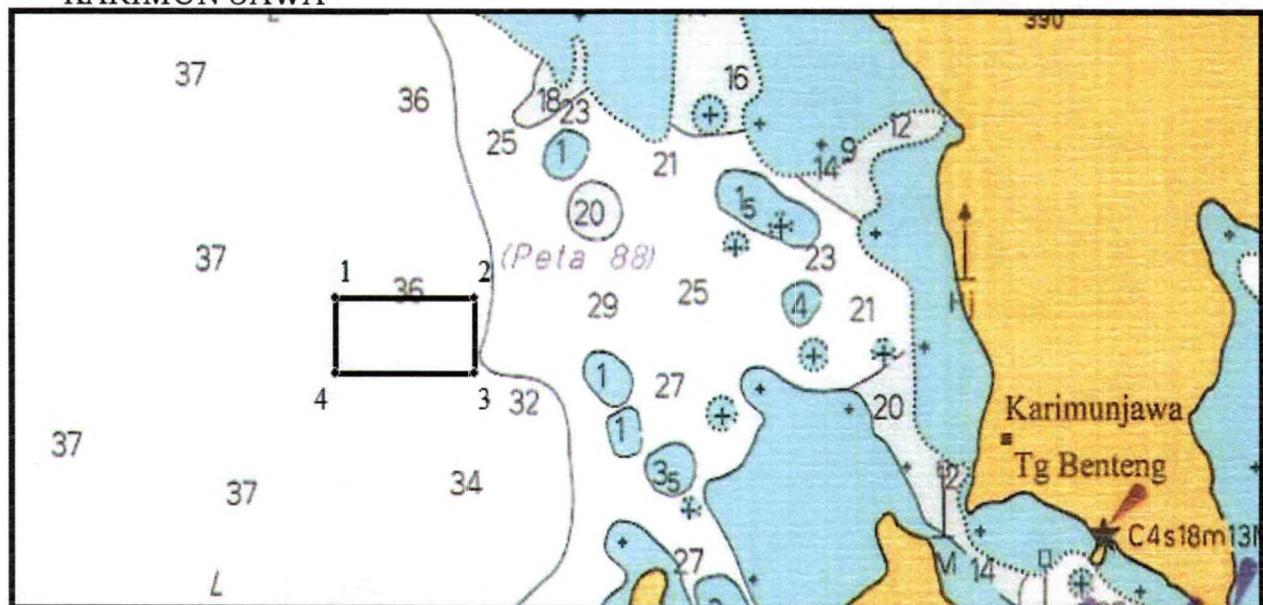
2. PETA *CENTER LINE* DAN ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KARIMUN JAWA



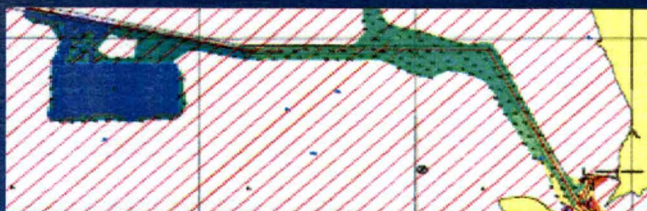
3. PETA DAERAH LABUH JANGKAR I KAPAL PENYEBERANGAN
KARIMUN JAWA



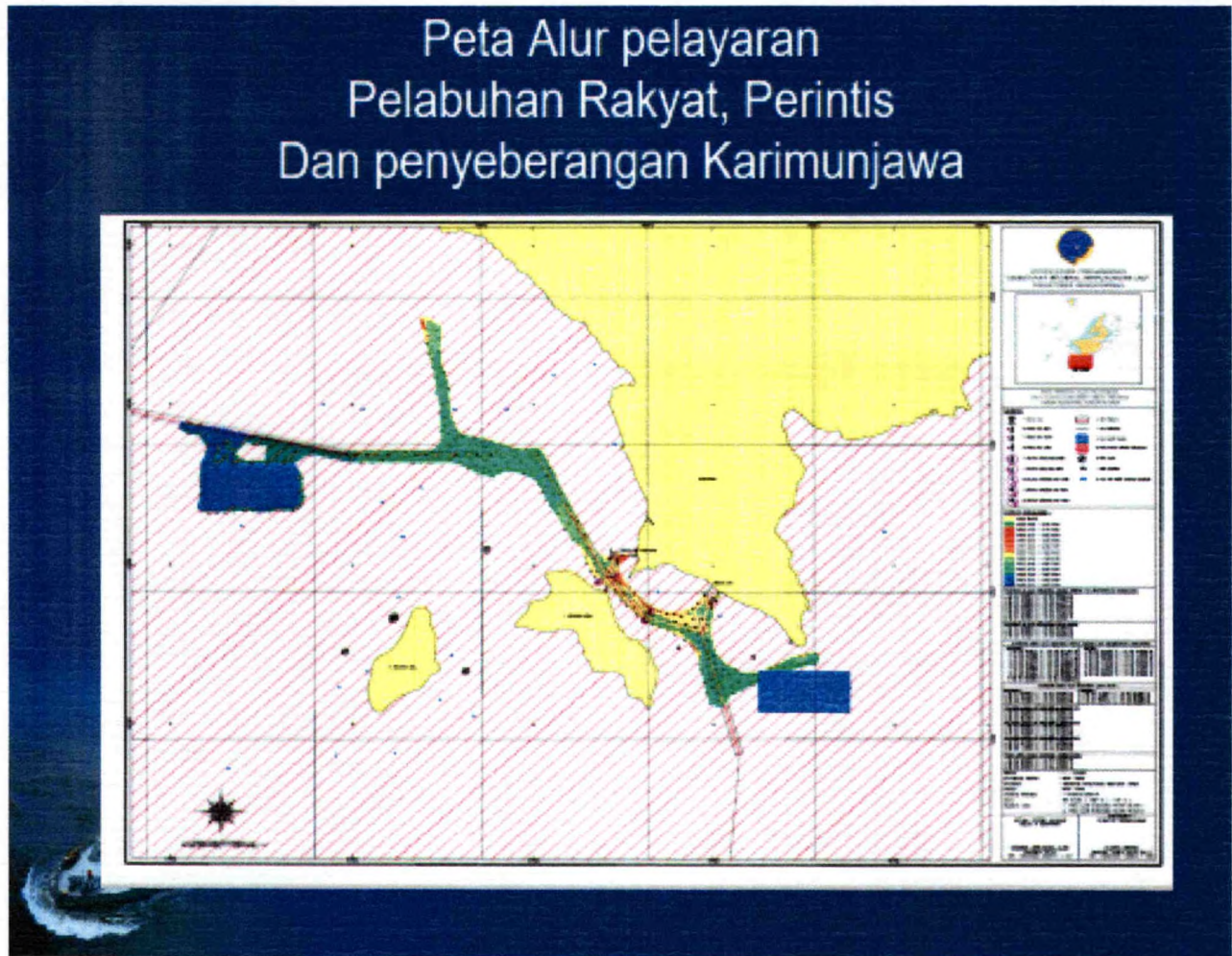
4. PETA DAERAH LABUH JANGKAR II KAPAL PENYEBERANGAN
KARIMUN JAWA



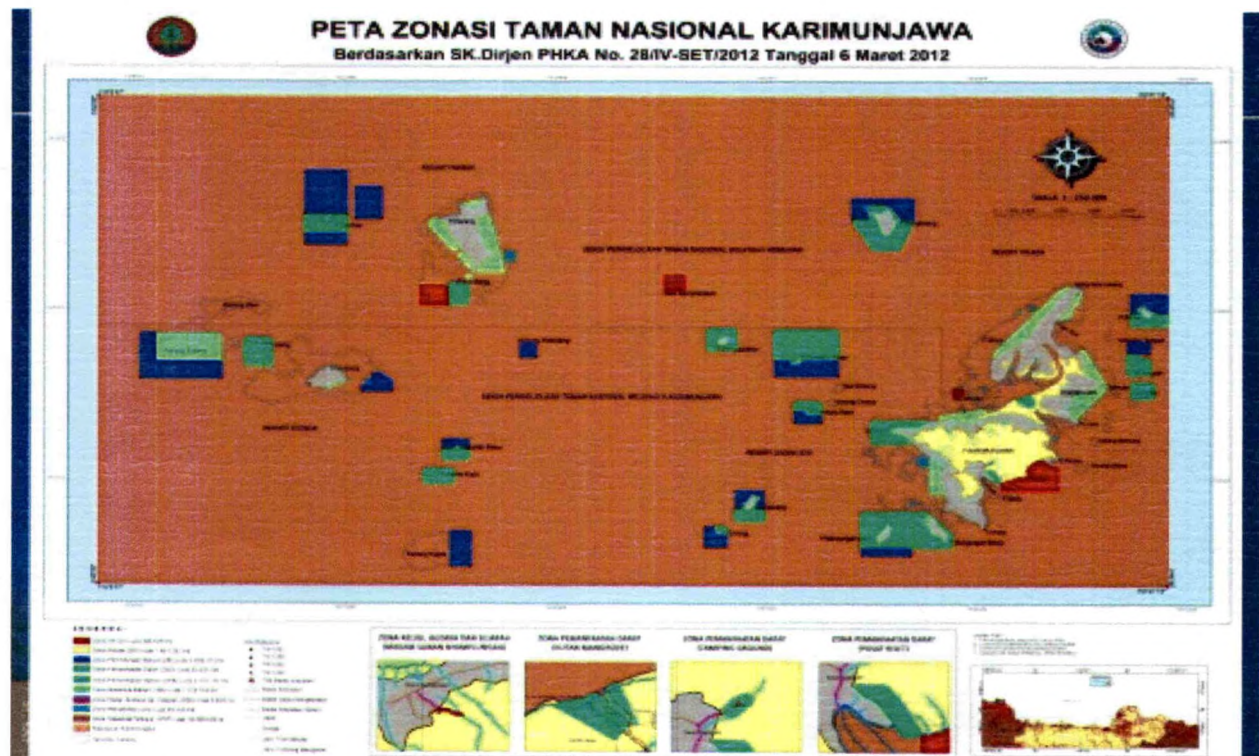
Area Labuh Jangkar Pelabuhan Rakyat, Perintis
Dan penyeberangan Karimunjawa



5. PETA TEMATIK ALUR-PELAYARAN DAN AREA LABUH I DAN AREA LABUH II DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KARIMUN JAWA



6. PETA ZONASI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA





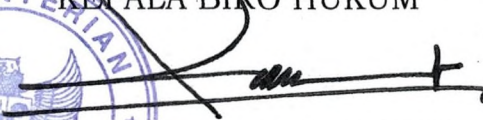
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM




WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001